

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP AKUNTANSI ZAKAT
PERUSAHAAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI TBK**

SKRIPSI

OKTA WAHYU SAPUTRA
NIM : 16622142



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP AKUNTANSI ZAKAT
PERUSAHAAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI TBK**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh :

OKTA WAHYU SAPUTRA
NIM : 16622142

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP AKUNTANSI ZAKAT PERUSAHAAN
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI TBK**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

OKTA WAHYU SAPUTRA
NIM : 16622142

Menyetujui

Pembimbing Pertama

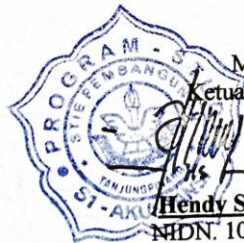


Masvithah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN. 1010109101 / Asisten Ahli


Pembimbing Kedua



Hasnarika, S.Si., M.Pd
NIDN. 1020118901 / Asisten Ahli



Mengetahui
Ketua Program Studi


Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP AKUNTANSI ZAKAT PERUSAHAAN
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI TBK**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

OKTA WAHYU SAPUTRA
NIM : 16622142

Telah dipertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian
Pada Hari Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua



Masvitah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN. 1010109101 / Asisten Ahli

Sekretaris

Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/Lektor

Anggota



Rachmad Chartady., S.E., M.Ak
NIDN. 1021039101 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 18 Januari 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang



Ketua,

Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/Lektor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OKTA WAHYU SAPUTRA
NIM : 16622142
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.35
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata – 1 (Satu)
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN KONSEP
AKUNTANSI ZAKAT PERUSAHAAN PADA
PT. BANK SYARIAH MANDIRI TBK

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tanjungpinang, 20 Januari 2021
Penyusun,



OKTA WAHYU SAPUTRA
NIM : 16622142

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

“Ibnu Qayyim Al Jauziyyah”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata I Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul **“ANALISIS PENERAPAN KONSEP AKUNTANSI ZAKAT PERUSAHAAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan ada kekurangan. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini, terutama pada :

1. Ibu CharlyMarlinda, SE.,M.Ak.Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PembangunanTanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,M.Si.Ak. CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
6. Masyitah As Sahara, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, serta membantu memberikan masukan kepada penulis.
7. Hasnarika, S.Si, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang perhatian mengingatkan dan meluangkan waktunya membimbing penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staff di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang sangat membantu dalam perkuliahan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi dunia pendidikan. Dan semoga Allah SWT memberikan ridha dan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Tanjungpinang, 18 Januari 2021

Penyusun

OKTA WAHYU SAPUTRA
NIM : 16622142

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori	
2.1.1 Akuntansi Syariah.....	9
2.1.2 Laporan Keuangan	13
2.1.3 Zakat	16

2.1.4 Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat	21
2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3. Kerangka Pemikiran	32
 BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Jenis Data	32
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4. Defenisi Operasional Variabel.....	34
3.5. Teknik Pengolahan Data	35
3.6. Teknik Analisis Data.....	36
3.7. Jadwal Penelitian	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri	38
4.1.2 Hasil Penelitian	43
4.2. Pembahasan	50
4.2.1 Perbandingan Pengelolaan Akuntansi Zakat pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PSAK 109.	50
4.2.2 Perbandingan Penyaluran Zakat pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PSAK 109	56
 BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Sumber Penerimaan Dana Zakat.....	44
Tabel 4.2 Pengakuan Zakat pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk	46
Tabel 4.3 Pos-Pos Laporan Neraca Bank Syariah Mandiri Tbk	50
Tabel 4.4 Pos-Pos Laporan Neraca PSAK 109	54
Tabel 4.5 Laporan Perubahan Dana Seuai PSAK 109	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Format Neraca Bank Syariah Mandiri Tbk
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Plagiarism

A B S T R A K

ANALISIS PENERAPAN KONSEP AKUNTANSI ZAKAT PERUSAHAAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk

Okta Wahyu Saputra. 16622142. Akuntansi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat Perusahaan menurut PSAK 109 Pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, Data yang diperoleh dihimpun menurut jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilaksanakan pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan masalah menurut apa adanya

Pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk belum secara rinci adanya pemisahan saldo dana zakat infak yang dibuat terpisah dalam laporan neraca. Hal ini tentunya untuk pengakuan dana zakat perusahaan pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dapat menjadi perhatian agar laporan keuangan yang disajikan sudah dapat memuat dana zakat yang terpisah dalam neraca.

Laporan perubahan dana zakat belum dibuat secara rinci pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. Adanya laporan perubahan dana tersebut akan lebih memudahkan pihak perusahaan untuk dapat mengetahui pendapatan dan penyaluran dana zakat secara terperinci setiap tahunnya sehingga hal ini sebaiknya menjadi perhatian bagi perusahaan untuk dapat membuat laporan perubahan dana atas penyaluran zakat pada setiap tahunnya.

Kata Kunci : Akuntansi Zakat, Zakat Perusahaan

Dosen Pembimbing I : Masyitah As Sahara, S.E.,M.Si

Dosen Pembimbing II : Hasnarika, S.Si.,M.Pd

A B S T R A C T

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF COMPANY ZAKAT ACCOUNTING CONCEPTS IN. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk

Okta Wahyu Saputra. 16622142. *Accounting*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

The purpose of this study is to determine the suitability of the Company Zakat Accounting Implementation according to PSAK 109 at PT. Bank Mandiri Syariah Tbk Branch. The research method used in this research is qualitative research methods.

In order to provide a clear, logical and accurate picture of the results of data collection, the data obtained are collected according to the type and group, then the data management and analysis is carried out in a descriptive qualitative way, namely raising the problem according to what it is.

At Bank Syariah Mandiri, Tbk, there is no detailed separation of the zakat-in-kind fund balance which is made separately in the balance report. This, of course, is for the recognition of company zakat funds at PT. Bank Mandiri Syariah Tbk Branch to be a concern so that the financial statements presented can already contain zakat funds that are separate in the balance sheet.

The report on changes to zakat funds has not been made in detail at PT. Bank Mandiri Syariah Tbk Branch. The existence of a report on changes in these funds will make it easier for the company to be able to find out the income and distribution of zakat funds in detail each year so that this should be a concern for companies to be able to make reports of changes in funds for zakat distribution every year.

Keywords : Zakat Accounting, Company Zakat

Supervisor I : Masyitah As Sahara, S.E.,M.Si

Supervisor II : Hasnarika, S.Si.,M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan dapat diketahui adalah alat strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran strategis ini utamanya dikarenakan oleh fungsi utama suatu bank sebagai kolektor dan saluran dana yang efektif serta efisien dari masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya mendukung keberlanjutan dan peningkatan implementasi pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan pesat sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional serta sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan yang kuat dan sehat. Perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan latar belakang kebutuhan masyarakat, khususnya sebagian umat Islam Indonesia untuk bank bebas bunga, lahirnya bank syariah di Indonesia yang menggunakan sistem perbankan bebas bunga telah berdampak signifikan pada sistem perbankan Indonesia. Konsep minat bank konvensional oleh sebagian umat Islam Indonesia dinilai riba, apalagi dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait larangan bunga bank.

Bank syariah merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (UUS) Republik Indonesia, 2008). Konsep zakat bertujuan untuk melestarikan agama,

akal, jiwa, keturunan dan harta. Islam mengajarkan asas kepedulian sosial yang diwujudkan melalui konsep zakat, sumbangan dan sedekah. Dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, perbankan syariah berupaya peduli terhadap sesama. Dalam mengklasifikasikan sumber penerimaan zakat, sebagian besar BUS menggunakan istilah sumber internal dan eksternal zakat. Sumber internal zakat adalah zakat yang berasal dari keuntungan perusahaan atau disebut zakat perusahaan. Sementara itu, sumber eksternal zakat adalah zakat dari nasabah, karyawan dan masyarakat. Pada 2017 ada 9 BUS yang menerima dana zakat.

Akuntansi zakat adalah subbagian akuntansi Islam. Dalam dunia penelitian adalah fenomena baru yang mulai sangat diminati. Zakat kini mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari rekening perusahaan yang tidak dapat diabaikan perannya dalam mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Zakat dipahami sebagai kewajiban keagamaan yang dikenakan kepada umat Islam, berbeda dengan pajak yang merupakan kewajiban seorang warga negara kepada negaranya. Karena sifat zakat sebagai bagian dari unsur kewajiban, hanya orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang tunduk pada kewajiban ini.

Hingga saat ini, zakat perusahaan telah diterapkan oleh unit usaha berbasis syari'ah sebagai bentuk representasi nilai-nilai syariah dalam kegiatannya. Dalam berbagai wacana, dinyatakan bahwa akuntansi syariah tercermin dalam metafora zakat, yang berarti bahwa unit usaha syariah adalah unit usaha berorientasi zakat (berorientasi zakah), tidak hanya berorientasi pada profit, sehingga perusahaan akan merealisasikan pembayaran zakat. Dengan demikian laba bersih (laba bersih)

bukan lagi ukuran kinerja perusahaan, melainkan zakat akan menjadi ukuran kinerja perusahaan.

Seiring dengan bertambahnya pertumbuhan bank umum syariah yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah di Indonesia sangat baik bagi masyarakat dan tentunya dapat memberikan peningkatan jumlah zakat wajib perusahaan yang ada. Wajib bagi bank umum syariah di Indonesia untuk membayar zakat perusahaan sebagaimana diatur undang-undang. No. 38/1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b yang menyatakan bahwa "Perdagangan dan perusahaan adalah aset yang tunduk pada zakat". Kajian tentang potensi zakat perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah zakat perusahaan yang dikumpulkan dari sektor BUS sebesar Rp 51 miliar (Andriani; Rakhmawati dan Fahmi, 2016). Namun, pelaksanaan zakat perusahaan di lapangan masih jauh dari yang diharapkan, yaitu masih dihadapkan pada masalah kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, tidak adanya fatwa dari lembaga resmi, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hal ini, dan tidak signifikannya efek pembayaran zakat terhadap beban membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rasya Fadila Balangger, 2017) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan kesesuaian dana zakat dan laporan dana kebajikan juga tidak konsisten dengan pengungkapan laporan dana zakat dan kebajikan, yaitu dalam penyaluran dana zakat dan dana kebajikan.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga berorientasi sosial sebagaimana termuat pada

UU No.21 Tahun 2008 mengenai bank syariah bisa menjalankan fungsi sosial berupa forum baitul maal, yaitu mendapat dana yang dari menurut zakat, infaq, shadaqah (ZIS), hibah, dana sosial lainnya serta menyalurkannya pada organisasi yang mengelola zakat, infaq, shadaqah. Dengan fungsi ini, Bank Umum Syariah (BUS) merupakan mata pelajaran zakat potensial di Indonesia.

PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah adalah sesuatu yang diharapkan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat mencapai pelaporan yang seragam dan kesederhanaan perekaman. Sehingga masyarakat dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat dan mengawasi pengelolaannya. Selain itu, penerapan PSAK 109 pula bertujuan agar dapat memastikan bahwa organisasi pengelola zakat sudah memakai prinsip syariah, serta sejauh mana OPZ mempunyai taraf kepatuhan dalam melaksanakannya. PSAK 109 yang digunakan mengatur akuntansi zakat, infaq/sedekah, mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal berkaitan menggunakan kebijakan penyaluran sampai operasionalisasi zakat, infaq/sedekah. Berdasarkan hasil pengamatan sementara dalam penelitian, dapat dilihat bahwa fenomena masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih belum tersedianya laporan secara terpisah berkenaan dengan akuntansi zakat pada Bank Syariah Mandiri. Tbk.
2. Dalam penyaluran dana zakat belum adanya laporan perubahan dana zakat sehingga belum tersedianya secara rinci perubahan dana zakat yang disalurkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dan melakukan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan diatas dengan judul penelitian **“Analisis Penerapan Konsep Akuntansi Zakat Perusahaan Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus PT. Bank Mandiri Syariah Tbk”**.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan gambaran identifikasi sebuah permasalahan sehingga dapat dilihat bahwa perumusan masalah tersebut merupakan pertanyaan yang lengkap dan sangat detail mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dipelajari berdasarkan permasalahan yaitu fenomena penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah yang ingin dik memeriksa penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat Perusahaan menurut perusahaan Pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk?
2. Bagaimana kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat Perusahaan menurut PSAK 109 Pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Zakat Perusahaan menurut perusahaan Pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk.

2. Untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat Perusahaan menurut PSAK 109 Pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Ilmiah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi para pembaca pada khususnya terkait Akuntansi Zakat pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Implementasi Konsep Akuntansi Zakat Perusahaan Pada Lembaga Keuangan Syariah
- b. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan dan mendalami teori khususnya mengenai Implementasi Konsep Akuntansi Zakat Perusahaan Pada Lembaga Keuangan Syariah

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori yang berupa penjabaran teori-teori yang mendukung variabel penelitian serta sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian lainnya. Bab ini juga akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Bab ini akan berisikan variabel penelitian dan definisi operasional variabel penelitian jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai variabel penelitian

BAB V Penutup

Berisi uraian kesimpulan dari pembahasan serta saran bagi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi, adalah proses pencatatan, klasifikasi, dan ringkasan peristiwa ekonomi dengan perlakuan logis dengan pandangan untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan saat membuat keputusan. (Islahuzzaman, 2012).

Akuntansi adalah kegiatan pengumpulan, analisis, penyajian dalam bentuk numerik, klasifikasi, pencatatan, ringkasan, dan penyitaan transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. (Rudianto, 2012). Akuntansi (akuntansi) adalah metodologi dan kumpulan pengetahuan yang terkait dengan sistem informasi unit ekonomi terlepas dari bentuknya, dibagi menjadi dua bagian. Pertama, akuntansi adalah pengetahuan terkait proses melaksanakan pembukuan dalam arti luas. Kedua, audit adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan terkait pemeriksaan dan evaluasi (evaluasi) hasil proses pembukuan. Sebab, nama akuntansi (akuntansi) lebih luas meliputi bidang teori, proses pembukuan, aplikasi atau praktik, serta pemeriksaan dan penilaian. Sedangkan istilah akuntansi hanya menunjukkan bidang teori (Sadeli, 2011).

Menurut Nurlala (2010), Akuntansi didefinisikan sebagai kegiatan layanan yang fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Informasi ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan rasional.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah kegiatan pencatatan, pengelompokan dan meringkas peristiwa ekonomi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada dasarnya adalah penggunaan akuntansi dalam melaksanakan syariah Islam. Menurut Wahyudi (2010) Akuntansi syariah didasarkan pada filsafat Islam sebagaimana terkuat dalam Al-Qur'an dan Hadits dan telah berhasil dilaksanakan oleh Nabi Muhammad di era kepemimpinannya dan berhasil menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bahagia di dunia akhirat. Perbedaan antara akuntansi Islam dan konvensional harus ada karena mereka memiliki basis filosofis yang berbeda.

Secara teknis akuntansi adalah kumpulan prosedur untuk merekam, mengklasifikasikan, meringkas dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan dan akhirnya menafsirkan laporan. (Al-Mashrafiyah, 2018). Secara sederhana, makna akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui kata-kata akarnya, yaitu akuntansi dan syariah, definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi ini untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Jadi, akuntansi Islam adalah elemen yang harus mampu mewujudkan sistem ekonomi syariah yang adil, jujur, kekayaan tidak menumpuk di satu sisi saja, tidak menghancurkan alam, iman, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Allah SWT. Akuntansi harus mampu menciptakan ekonomi dan Islam yang beranaseing baik yaitu rahmatan lil alamin.

Akuntansi syariah (Maryanti, Hidayat, & Nurhayati, 2016) adalah proses akuntansi untuk transaksi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sehingga bisa disimpulkan bahwa akuntansi syariah merupakan aktivitas pencatatan data historis dari nilai-nilai Islam serta konsep-konsep yang diterapkan pada Al-Qur'an & bermanfaat buat menaruh berita keuangan yang dipakai buat pengambilan keputusan oleh pengguna. Dari definisi akuntansi syariah yang sudah dijelaskan secara teoritis tidak ada perbedaan antara akuntansi konvensional atau akuntansi syariah, hanya saja pada akuntansi syariah ditekankan dalam nilai-nilai Islam yang diatur pada bagian mu'amalah serta konsep-konsep yang sudah diatur pada Al. -Qur'an menjadi dasar utama. Sementara itu, akuntansi konvensional sendiri didasarkan pada nilai-nilai kapitalis dan sosialis yang diambil dari beberapa negara barat.

Tujuan dari akuntansi syari'ah itu sendiri dalam lembaga keuangan syari'ah menurut Anam (2017) terdapat dua alasan, yaitu:

1. Lembaga keuangan syariah dijalankan dengan kerangka syari'ah, sebagai hasil dari sifat transaksi yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.
2. Pengguna informasi akuntansi syari'ah di lembaga keuangan Syari'ah berbeda dengan pengguna informasi akuntansi di lembaga keuangan konvensional.

Prinsip akuntansi syariah berdasarkan pengukuran dan penyingkapannya terdiri dari:

1. Zakat: penilaian bagian zakati yang diukur secara akurat, dibayarkan kepada mustahik sebagaimana diinginkan oleh Al-Qur'an (delapan asnaf) atau zakat juga dapat disalurkan melalui lembaga zakat resmi.
2. Bebas bunga: entitas harus menghindari minat untuk menagih transaksi yang terjadi.
3. Halal: menghindari bentuk-bentuk bisnis yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh syariah.

Menurut Riansyah (Puspitasari & Habiburrochman, 2013) prinsip umum akuntansi syariah adalah sebagai berikut :

1. Asas tanggung jawab dan berpegang pada mandat (fungsi khalifah) Akuntabilitas terkait dengan mandat yang diberikan. Akuntabilitas biasanya dalam bentuk laporan keuangan / akuntansi.
2. Prinsip Keadilan. Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar, jujur dan imparisial.
4. Asas kebenaran) tidak dapat dipisahkan dari asas keadilan. Contoh: dalam akuntansi selalu dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan baik jika didasarkan pada nilai kebenaran.

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang bisa menjelaskan kondisi keuangan perusahaan, dan informasi tersebut juga bisa dijadikan gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2015).

Menurut Kasmir (2014), pengertian laporan keuangan adalah: Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Menurut Anantawikrama Tungga Atmadja & Ni Kadek Sinarwati (2014), definisi laporan keuangan adalah: Informasi yang menjelaskan kondisi laporan keuangan perusahaan dan informasi lebih lanjut dapat digunakan sebagai deskripsi kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan umumnya meliputi neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, pengembangan perusahaan dan hasil operasi suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

Laporan keuangan adalah catatan keuangan mengenai kegiatan perusahaan atau organisasi selama periode waktu tertentu (satu periode akuntansi / satu tahun yang menunjukkan kondisi selama periode tersebut dan digunakan sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan materi dan hal-hal krusial , yaitu uang, pasti dan harus dicatat dalam bentuk laporan keuangan (Ryan Ariefiansyah & Miyosi Margi Utami, 2012).

Dalam Asosiasi Akuntansi Indonesia, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan, ada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan berguna bagi bankir, kreditur, pemilik, dan pihak yang berkepentingan dalam menganalisis dan menafsirkan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Dari beberapa uraian pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis dan memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu.

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Indonesia (2012), Laporan keuangan termasuk bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan lengkap biasanya mencakup neraca, laporan pendapatan, perubahan ekuitas, perubahan laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dengan berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas), catatan dan laporan lain dan materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.

2.1.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan yakni memberikan informasi untuk pihak yang memerlukan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dalam bentuk angka (Fahmi, 2015).

Menurut Wantah (2015), Tujuan utama laporan keuangan adalah: Untuk memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan pada elemen laporan

keuangan yang ditujukan kepada pihak lain dengan minat untuk menilai kinerja keuangan perusahaan selain manajemen perusahaan.

Menurut Kasmir (2014), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah aset (aset) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah liabilitas dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah penghasilan yang diperoleh pada periode tertentu.
4. Memberikan informasi mengenai besaran biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu.
5. Memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada aset, liabilitas, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi mengenai kinerja manajemen perusahaan dalam sebuah periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut Ryan Ariefiansyah & Miyosi Margi Utami (2012), Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang terkait erat dengan pengambilan keputusan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:3), tujuan laporan keuangan adalah: pemberian informasi tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan sehingga berguna bagi sejumlah pengguna untuk menciptakan keputusan ekonomi.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka bisa ditarik suatu kesimpulan tujuan laporan keuangan adalah:

1. Informasi tentang posisi laporan keuangan yang didapatkan menurut kinerja serta aset perusahaan sangat diperlukan oleh pengguna laporan keuangan, menjadi bahan penilaian & perbandingan agar dapat melihat dampak finansial yang ada menurut keputusan ekonomi yg mereka buat.
2. Informasi keuangan perusahaan juga diperlukan untuk menilai dan memprediksi apakah perusahaan hadir dan di masa depan sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.

Informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan berguna untuk menilai kegiatan investasi, pembiayaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.

2.1.3 Zakat

Zakat adalah ibadah wajib dengan dimensi sosial yang memiliki banyak pelajaran untuk hubungan sosial melalui pemanfaatan dan penyaluran zakat secara merata kepada mustahiq sehingga dapat meminimalisir kesenjangan sosial melalui memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Zakat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal dapat disalurkan langsung dari pemberi zakat (muzaki) kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat (mustahiq). Zakat juga dapat disalurkan melalui lembaga pengelola amil atau zakat.

Dalam pernyataan zakat PSAK No.109 adalah aset yang harus dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah yang akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat merupakan lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Infaq wajib atau sunnah, infaq wajib termasuk zakat dan infaq sunnah adalah shadaqah. Shadaqah adalah pemberian kekayaan kepada masyarakat miskin, orang-orang yang membutuhkan atau pihak lain yang berhak menerima shadaqah tanpa kompensasi apa pun, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlahnya, kapan saja dan dalam jumlah berapa pun (Mu'rs 2011). Dalam PSAK No. 109, infaq/shadaqah adalah aset yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, apakah tujuannya terbatas (ditentukan) atau tidak.

Menurut (Ridwan, 2012) menjelaskan bahwa: "Pengelolaan zakat dikelola dengan sistem kerja dan profesional, serta manajemen dan manajemen perusahaan. Namun, aturan atau peraturan sesuai dengan syariat hukum tidak boleh ditinggalkan. "Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengolahan zakat, diharapkan pengolahan zakat dapat mencapai tujuan itu sendiri.

Pengelolaan zakat adalah proses dan organisasi sosialisasi, pengumpulan, penyaluran dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Kholis, Sobaya, Andriansyah, & Iqbal, 2014). Dari pengertian pengelolaan zakat tersebut

menjelaskan bahwa ada tiga unsur pengelolaan, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

a. Pendistribusian

Penyaluran adalah kegiatan di mana zakat dapat tiba di mustahiq dengan benar. Kegiatan distribusi erat kaitannya dengan pemanfaatan, karena apa yang akan disalurkan disesuaikan dengan pemanfaatan (Hasanah, 2016). Dana yang telah dihimpun kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya.

b. Pendayagunaan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat dapat dimanfaatkan untuk upaya produktif dalam rangka penanganan masyarakat miskin dan peningkatan kualitas umat. Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif dilakukan ketika kebutuhan pokok mustahiq telah terpenuhi. Pemanfaatan produktif saat ini sangat diperlukan karena dengan pemanfaatan aset zakat yang produktif yang diterima mustahiq tidak hanya habis, tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan surat dan tujuan zakat itu sendiri, yaitu menghilangkan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya mustahiq tetapi akan menjadi muzakki (Widodo, 2012).

Menurut (Mursyidi, 2013) Akuntansi zakat merupakan proses pengakuan kepemilikan dan sarana pengukuran nilai aset yang dimiliki oleh seorang muzakki untuk keperluan penetapan zakat nisab dari aset yang bersangkutan dalam rangka penghitungan zakatnya. Zakat akuntansi terkait dengan tiga hal utama, yaitu

penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu pengelola dalam alokasi zakat.

2.1.3.1 Macam-Macam Zakat

Menurut (Malik, 2014) Zakat terbagi atas dua tipe yakni Zakat Fitrah dan zakat Harta.

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam sebagai pembersih bagi diri sendiri dan untuk tanggung jawabnya, selain menghilangkan noda yang terjadi selama puasa di bulan Ramadhan. Zakat Fitrah ini harus dipenuhi oleh setiap muslim karena untuk menutupi kekurangan puasa yang diisi dengan hal-hal yang sia-sia dan kata-kata kotor, yang mampu mengeluarkan Zakat Fitrah. Menurut mayoritas ulama, keterbatasan untuk bisa di sini adalah memiliki makanan berlebih untuk dirinya sendiri dan disediakan untuk di malam hari dan pada siang hari 'ied. Jadi kalau kondisi seseorang seperti ini berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan Zakat Fitrah. Kepala keluarga wajib membayar Zakat Fitrah untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab atas Zakat Fitrah istri karena istri merupakan tanggung jawab suami.

2. Zakat Maal / Harta

Maal (harta) Menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut

syar'a, properti adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan akal sehatnya.

2.1.3.2 Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2011 tentang Zakat Pasal 4 ayat 3, yaitu "Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah milik perorangan muzaki atau badan usaha". Perusahaan tersebut merupakan badan usaha, karena memiliki izin usaha termasuk koperasi. Zakat pada perusahaan dianalogikan dengan zakat pada perdagangan, yang wajib pada zakat adalah aset yang dimiliki atau modal perusahaan ditambah keuntungan, dan pendapat lain mengatakan bahwa apa yang harus zakat zakat hanya untuk keuntungan. Perhitungan nisab dan tingkat zakat sama dengan zakat perdagangan, yaitu ada haul (satu tahun), nisab adalah 85 gram emas dan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen (Fatmawati, Nurhasanah, & Nurdin, 2016).

Zakat perusahaan menjadi representasi syariah perusahaan dibutuhkan bisa memicu pertumbuhan dan penyaluran ekonomi yang lebih baik dan wajib didukung menggunakan penerapan sistem sehingga menjadi upaya buat melaksanakan perhitungan serta pencatatan zakat yg benar (Ridwan, 2012). Perusahaan dalam biasanya bisa bertindak menjadi amil (pengelola) menggunakan menyebarkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya pada bentuk pembiayaan qardhul hasan atau menggunakan menyalurkannya melalui forum zakat yang ditunjuk pada perusahaan. Sehingga perlakuan dan penyajian zakat perusahaan pada laporan keuangan sebuah perusahaan sangat krusial menjadi konsep dasar penentuan besaran zakat sebuah perusahaan.

Hingga saat ini, zakat perusahaan telah diterapkan oleh unit usaha berbasis syariah sebagai bentuk representasi nilai syariah dalam kegiatannya. Dalam berbagai wacana, dinyatakan bahwa akuntansi Islam tercermin dalam metafora zakat, yang berarti bahwa unit usaha syariah adalah unit usaha yang berorientasi zakat dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, sehingga perusahaan akan merealisasikan pembayaran zakat. (Ridwan, 2012). Dengan demikian laba bersih (laba bersih) bukan lagi ukuran kinerja perusahaan, tetapi jika tidak zakat akan menjadi ukuran kinerja perusahaan.

2.1.4. Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat

PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sadaqah adalah sesuatu yang diharapkan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat mencapai pelaporan yang seragam dan kesederhanaan perekaman. Sehingga masyarakat dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat dan mengawasi pengelolaannya. Selain itu, penerapan PSAK 109 juga bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah menggunakan prinsip syariah, dan sejauh mana OPZ memiliki tingkat kepatuhan dalam melaksanakannya. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses perekaman, klasifikasi, ringkasan, pelaporan, dan analisis data keuangan organisasi. Dalam arti lain, akuntansi didefinisikan sebagai kegiatan layanan untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial, kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini untuk pengambilan keputusan. Akuntansi zakat merupakan proses pengakuan atas kepemilikan dan pengukuran nilai aset yang dimiliki oleh seorang

muzakki untuk tujuan menentukan zakat nisab dari harta yang bersangkutan dalam rangka penghitungan zakatnya. Zakat akuntansi terkait menggunakan 3 hal utama, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, serta akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat buat pengambilan keputusan, terutama buat membantu pengelola pada alokasi zakat.

Dalam pernyataan zakat PSAK No.109 merupakan aset yang wajib disalurkan oleh muzakki dengan menggunakan ketentuan syariah yang akan diberikan pada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat merupakan lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam PSAK Nomor 109, infaq/shadaqah adalah aset yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, apakah tujuannya terbatas (ditentukan) atau tidak. Penerapan perlakuan akuntansi ZIS dalam hal ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Zakat 109 (PSAK 109) yang dikeluarkan IAI sebagai standar pelaporan keuangan amil dalam menyusun laporan keuangan Lembaga Amil Zakat. Ruang lingkupnya terbatas pada penerimaan dan penyaluran dana ZIS secara amil.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2017), amil yang mendapat izin dari regulator maupun tidak, wajib menerapkan PSAK 109 ini. Fatwa MUI yang dijadikan rujukan sebagai berikut :

1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang kriteria, tugas amil amil zakat dan pengenaan biaya operasional untuk kegiatan amil zakat yang dapat diambil

dari bagian amil, atau dari bagian fi sabilillah dalam batas kewajaran, proporsionalitas dan sesuai dengan prinsip Islam.

2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Aset Haram, di mana zakat harus ditebus dari aset halal baik dalam jenis maupun metode memperolehnya.
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Zakat Dalam Bentuk Aset Terkelola. Yang dimaksud dengan aset yang sedang pengelolaannya adalah sarana dan/atau prasarana yang diperoleh dari aset zakat dan secara fisik dalam pengelolaan pengelola sebagai perwakilan untuk zakat mustahik, sedangkan manfaatnya dialokasikan untuk zakat mustahik.
4. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Aset Zakat. Tugas Amil zakat adalah mengumpulkan, memelihara, dan mendistribusikan. Jika amil menyalurkan zakat secara tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas AMIL dianggap selesai ketika mustahik menerima dana zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010) adalah : "Pedoman yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur bagaimana transaksi diakui atau dicatat, ketika harus diakui, cara mengukurnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan." Apa jenis laporan keuangan yang harus disampaikan, elemen atau konten laporan keuangan apa saja, bagaimana

format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi adalah hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010) terdiri dari:

1. Pengakuan Dan Pengukuran

a. Zakat

1) Penerimaan Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui ketika aset tunai atau non tunai diterima.
- b) Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai tambahan dana zakat dalam jumlah yang diterima, jika dalam bentuk tunai dan wajar, jika dalam bentuk non tunai..

Penentuan nilai wajar aset non tunai yang diterima menggunakan harga pasar. apabila harga pasar tidak dapat tersedia, maka metode penentuan nilai masuk akal lainnya dapat menggunakan GAAP Indonesia yang relevan bisa digunakan. apabila muzaki memilih mustahik yang mendapat penyaluran zakat melalui amil, maka tidak terdapat bagian amil atas zakat yang diterima. Amil mampu menerima ujah buat aktivitas distribusi ini. Ujah ini dari berdasarkan muzaki, pada luar dana zakat. Ujah diakui menjadi tambahan dana amil. apabila terjadi penurunan nilai aset zakat non tunai, maka besaran tertanggung diharapkan menjadi pemotongan dana zakat atau dana amil tergantung penyebab kerugian.

2. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pemotongan dana zakat sebesar yang diberikan, jika dalam bentuk tunai dan jumlah bodong, jika dalam bentuk aset non tunai.

- a. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat tergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional agar dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip atau prinsip tata kelola organisasi syariah dan baik.
- b. Penentuan jumlah atau persentase suku cadang untuk setiap mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah,
- c. Keadilan, etika, dan ketentuan yang berlaku dinyatakan dalam bentuk kebijakan amil.
- d. Beban pengumpulan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dapat melakukan peminjaman dana zakat dalam rangka pengumpulan zakat. Pinjaman ini dilakukan dalam jangka pendek dan tidak boleh melewati lebih dari satu periode (haul).
- e. Porsi dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai tambahan dana amil.
 - 1) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika telah diterima oleh mustahik nonamil. Zakat yang disalurkan melalui amil lainnya, tetapi belum diterima sang nonamil mustahik, belum memenuhi makna bahwa zakat sudah disalurkan. Amil lainnya nir berhak

merogoh bagian menurut dana zakat, namun sanggup mendapatkan ujah menurut amil sebelumnya. Dalam keadaan misalnya itu, zakat yang disalurkan diakui menjadi piutang buat didistribusikan, sedangkan amil yang menerimanya diakui menjadi kewajiban penyaluran. Piutang buat penyaluran & kewajiban penyaluran akan menurun saat zakat disalurkan eksklusif ke nonamil mustahik.

- 2) Dana zakat yang diberikan pada mustahik nonamil menggunakan kewajiban mengembalikannya ke amil belum diakui menjadi penyaluran zakat.
- f. Dana zakat yang penyalurannya pada bentuk perolehan aset permanen (aset yang dikelola), contohnya rumah sakit, sekolah, kendaraan beroda empat ambulan, & fasilitas lain, diakui menjadi:
- 1) Penyaluran zakat seluruhnya apabila aset permanen tadi diserahkan buat dikelola pada pihak lain yang tidak dikendalikan oleh amil.
 - 2) Penyaluran zakat secara sedikit demi sedikit apabila aset permanen tadi masih pada pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara sedikit demi sedikit diukur sebanyak penyusutan aset permanen tadi sinkron menggunakan pola pemanfaatannya.

PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infaq, & shadaqah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pernyataan ini berlaku bagi amil yang mendapat serta menyalurkan zakat & infaq/sedekah. Amil yang mendapat serta menyalurkan zakat, infaq/sadaqah, adalah organisasi pengelola

zakat yang pembentukannya dimaksudkan buat mengumpulkan serta menyalurkan zakat, infaq/sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku bagi badan usaha syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah, tetapi bukan kegiatan utama mereka.

Menurut Mursyidi (2013) Akuntansi zakat merupakan proses pengakuan kepemilikan dan sarana pengukuran nilai aset yang dimiliki oleh seorang muzakki untuk keperluan penetapan zakat nisab dari aset yang bersangkutan dalam rangka penghitungan zakatnya. Zakat akuntansi terkait dengan tiga hal utama, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu pengelola dalam alokasi zakat. PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sadaqah adalah sesuatu yang diharapkan. Penerapan PSAK ini juga diharapkan dapat mencapai pelaporan yang seragam dan kesederhanaan perekaman. Sehingga masyarakat dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat dan mengawasi pengelolaannya. Selain itu, penerapan PSAK 109 juga bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah menggunakan prinsip syariah, dan sejauh mana OPZ memiliki tingkat kepatuhan dalam melaksanakannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Meidawati (2011) tentang Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan. Untuk dapat mengelola organisasi Zakat Infak Sadaqah (ZIS) dengan baik, diperlukan sistem informasi yang baik, salah satunya

zakat akuntansi. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem akuntansi khusus pengelolaan keuangan di Badan Amil Zakat Infak Sadaqah (BAZIS), yang hingga saat ini belum banyak buku yang membahas pedoman atau standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga tersebut, padahal banyak lembaga yang telah tumbuh dan berkembang. - Lembaga BAZIS di Indonesia. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, perlu diterapkan zakat akuntansi khusus untuk organisasi ZIS, yaitu bagaimana mengelola dana zakat, sehingga tujuan awal pengumpulan zakat dapat tercapai dan mencapai tujuannya, serta bagaimana menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan sebagai tanggung jawab pengelola kepada pemberi zakat. Akuntansi zakat diperlukan karena kekhususan organisasi pengelola dana Zis dan informasi akuntansinya.

2. Penelitian Kristin (2011) tentang Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). Dalam mengelola zakat, harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat menyiapkan laporan keuangan yang baik dan transparan. Namun, masih banyak BAZIS dan LAZIS yang belum menggunakan zakat akuntansi, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka tetap menggunakan akuntansi konvensional. Padahal PSAK no.109 sudah dikeluarkan mengenai akuntansi zakat. Fenomena ini menjadi alasan untuk melakukan penelitian penerapan akuntansi zakat

yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, mekanisme pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (LAZ DPU DT) Cabang Semarang menjadi topik penelitian ini. Akuntansi dana zakat yang dilakukan oleh LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai cash base, dimana model pencatatan transaksi akuntansi mencatat seluruh pendapatan yang telah diterima. Dan dalam proses pelaporan LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT Cabang Semarang tidak memiliki aset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan sesuai PSAK Nomor 109 di antaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan aset yang sedang pengelolaan, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan tidak sesuai dengan PSAK No. 109.

3. Penelitian Ritonga (2017) tentang Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Sumut sesuai dengan PSAK Nomor 109. Penelitian ini dilakukan untuk menguji laporan keuangan yang disiapkan BAZNAS Sumut dan untuk mengetahui penerapan zakat, sadaqah dan infaq sesuai dengan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini

berkonlitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumut belum sepenuhnya melaksanakan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK Nomor 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sadaqah.

4. Penelitian Kadir (2019) tentang *Management of Accounting for Business Zakat Practices in Malaysia: A Closer Look*. Zakat adalah salah satu pilar dalam Islam. Di Malaysia, zakat telah dipraktikkan sejak kedatangan Islam. Dan hari ini, praktik-praktiknya telah terstruktur dengan baik melalui pembentukan lembaga-lembaga zakat, cakupan yang lebih luas tentang aset-aset yang dapat di zakat dan penentuan teknik perhitungan yang tepat. Ini menghasilkan peningkatan pengumpulan zakat hingga miliaran ringgit per-tahun. Makalah ini dirancang untuk mengeksplorasi evolusi praktik zakat bisnis di Malaysia, termasuk penggunaan akuntansi untuk memfasilitasi perhitungan zakat bisnis. Ini akan membahas tentang bagaimana perhitungan zakat bisnis sedang disusun di Malaysia, penerimaan akuntansi terhadap praktik zakat bisnis dan perkembangan terkini untuk memperkuat praktik zakat bisnis. Saat ini, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menggunakan akuntansi untuk memfasilitasi perhitungan zakat bisnis telah dimulai, tetapi belum selesai. Dengan demikian, makalah ini menyarankan studi post-struktural untuk dilakukan untuk meninjau dan meningkatkan struktur yang ada dari kedua, praktik akuntansi dan zakat. Ketentuan Syariah yang dibebankan pada aset bisnis

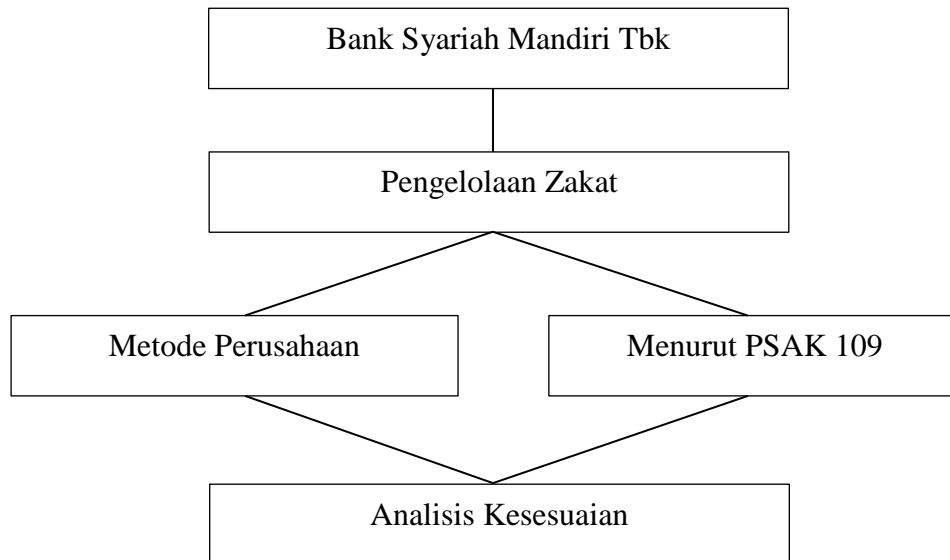
yang dapat ditagih perlu diselaraskan dengan prinsip akuntansi, demi kedua praktik tersebut. Ini untuk memastikan bahwa pengungkapan akuntansi dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan aset bisnis yang dapat ditagih.

5. Penelitian Ruliana (2017) tentang *Zakat in Employees Income Tax*. Pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang paling sering dipungut oleh pemerintah dan membayar pajak adalah kewajiban bagi rakyat Indonesia. Selain itu, dalam agama Islam juga kewajiban membayar profesi zakat bagi mereka yang telah memenuhi nisab untuk membayar zakat. Pemerintah telah menerbitkan peraturan PP. 60 tahun 2010 tentang Zakat atau kontribusi agama wajib yang dapat dikurangkan dari pendapatan kotor mengacu pada UU No.38 tahun 1999 dan kemudian diperbarui menjadi UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ini dilakukan agar tidak menggandakan beban. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pelayaran yaitu untuk menghitung dan menganalisis kesesuaian aplikasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan karyawan (PPh 21) dengan undang-undang manajemen zakat. 23 tahun 2011.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang disesuaikan dengan penelitian (2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis hanya menguraikan dan memaparkan hasil penelitian dengan jelas dan sistematis tanpa menghubungkan atau mengkaitkan unsur-unsur yang lain dalam penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2015) menyatakan bahwa : “Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain”.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah data kualitatif yaitu berupa data-data yang diwujudkan dengan hasil analisa data yang didapatkan dilapangan berkenaan dengan akuntansi zakat perusahaan pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk sehingga dapat mengetahui bagaimana perusahaan bisa mengoptimalkan akuntansi zakat perusahaan. (Sugiyono, 2013)

3.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data penelitian di lapangan adalah Data Sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian, dan mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian di lapangan seperti catatan-catatan perusahaan, (Sugiyono, 2013). Berdasarkan dari

pengertian tersebut dapat diketahui data sekunder dalam penelitian ini merupakan laporan pengelolaan zakat perusahaan pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian harus menggunakan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data berguna untuk mendapatkan data yang akurat tentang objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2013) pengumpulan data adalah mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku pedoman beberapa literatur yang ada hubungannya dengan penulisan ini. (Sugiyono, 2013)

2. Penelitian Lapangan (*Field Reserarch*)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan cara :

- a. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan serta arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, seperti catatan zakat perusahaan. (Sugiyono, 2013)

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Berikut merupakan tabulasi dari definisi operasional variabel dalam penelitian ini :

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Akuntansi Zakat Perusahaan	Zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik dan harus didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat yang benar (Ridwan, 2012).	<p>1. Pengakuan dan Pengukuran</p> <p>Penerimaan zakat diakui ketika aset tunai atau non tunai diterima. Zakat yang diterima diakui sebagai tambahan dana zakat dengan jumlah yang diterima, jika dalam bentuk tunai dan wajar, jika dalam bentuk non tunai.</p> <p>2. Penyaluran Zakat</p> <p>Zakat yang dikucurkan diakui sebagai pemotongan dana zakat dalam jumlah yang</p>

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
		<p>diberikan, jika dalam bentuk tunai dan dicatat</p> <p>Sumber : (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010)</p>

Sumber : Peneliti, 2020

3.5 Teknik Pengolahan Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu meliputi reduksi data , Penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam mengolah data hasil temuan lapangan, sesuai pendapat Miles and Huberman (Sugiyono, 2015b) sebagai berikut :

a. Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dimulai dari pengamatan, laporan keuangan dan dokumentasi. Data tersebut meliputi gambaran umum tentang kondisi perusahaan. Data yang diperoleh melalui pengamatan , penelitian pustaa dan dokumentasi demikian banyak dan kompleks serta masih bercampur-campur, maka dibuatlah reduksi terhadap data-data tersebut. Dalam reduksi dilakukan seleksi untuk memilih data yang relevan dan bermakna, yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan untuk menjawab pertanyaan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka ditentukan komponen yang terfokus untuk diamati dari laporan dana zakat perusahaan, yaitu mengenai data dalam penelitian. Hasil pengumpulan data dan pengamatan tahap dua ini dibentangkan atau disajikan.

c. *Conclusion Drawing* (Verification)

Pada tahap ini data yang disajikan selanjutnya direduksi lagi sehingga akhirnya ditarik kesimpulan yang mengarah kepada pemecahan masalah dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, data yang diperoleh dihimpun menurut jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilaksanakan pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan masalah menurut apa adanya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data (Moleong, 2009).

3.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan			
		September	Oktober	November	Desember
1	Penyusunan Proposal Penelitian				
2	Seminar Proposal Penelitian				
3	Perbaikan Hasil Seminar Proposal				
4	Pengumpulan Administrasi Penelitian				
5	Pengumpulan Data				
6	Analisis dan Pengolahan Data				
7	Penyusunan Skripsi				
8	Sidang Skripsi				

DAFTAR PUSTAKA

- AL-MASHRAFIYAH. (2018). Keuangan dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi*.
- Anam, M. K. (2017). PENERAPAN PSAK 101 PADA LAPORAN DANA ZAKAT DAN DANA KEBAJIKAN. *Misykat Al Anwar*.
- Fatmawati, E., Nurhasanah, N., & Nurdin. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*.
- Hasanah, U. (2016). "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta. *Penelitian Ilmiah*, 3.
- Hidayat, S. dan S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Ikatan Akuntan Indonesia, I. (2010). *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kadir. (2019). *Management of Accounting for Business Zakat Practices in Malaysia: A Closer Look. Zakat adalah salah satu pilar dalam Islam*.
- Kholis, N., Sobaya, S., Andriansyah, Y., & Iqbal, M. (2014). Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *La_Riba; Jurnal Ekonomi Islam*.
- Kristin. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)
- Malik, A. (2014). Ragam Kepentingan Lembaga Tatakelola Zakat. *Media Akademika*.
- Maryanti, Y., Hidayat, A. R., & Nurhayati, N. (2016). Analisis Penerapan PSAK 102 di BMT itQan dalam Kaitannya dengan Pembiayaan Murabahah. *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*.
- Meidawati. (2011). Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan.
- Moleong, L. (2006). Metodologi penelitian Kualitatif. *Kualitatif Sasial*.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Puspitasari, Y., & Habiburrochman. (2013). Penerapan PSAK No.109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Ridwan, M. (2012). *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.

Ritonga. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara

Ruliana. (2017). *Zakat in Employees Income Tax*

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D* (14th ed.). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian. In *Alfabeta, Bandung*.

Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, H. (2012). *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zaka*. Jakarta: IMZ.

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : OKTA WAHYU SAPUTRA
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 16 Oktober 1995
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Pramuka Lr. Bali RT. 001 RW. 005
No Hp : 082174559235
Riwayat Pendidikan Formal : SD Negeri 017 Tanjungpinang
SMP Negeri 6 Tanjungpinang
SMK Negeri 1 Tanjungpinang
STIE Pembangunan Tanjungpinang